

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT
POLDA SUMSEL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

RAHMANIDA RIZKY PRATIWI

NPM. 16 01 12 00 55

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rahmanida Rizky Pratiwi
NPM : 16.01.12.00.55
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Masyarakat Polda Sumsel

Pembimbing Skripsi

Tanggal 15-10-2020 Pembimbing I: Meti Zulivana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701

Tanggal 15-10-2020 Pembimbing II : Rifani Akbar S, SE, MM, M.Ak, Ak, CA
NIDN : 0231058801

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti,



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyiroh:6-8)
- “Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolong mu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal.” (Q.S. Al-Imran:160)
- Meskipun kamu bersama orang baik bahkan satu atap sekalipun, jika kamu tidak mau berusaha untuk menjadi baik, kamu tidak akan menjadi baik. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri. (Penulis)

Kupersembahkan Kepada:

- Mama, Papa dan ke dua saudara ku yang selalu mendukung ku
- Para dosen dan pembimbing yang sudah mengajar dan membimbing ku menyelesaikan pendidikan S1
- Teman-teman seperjuangan Akuntansi
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah kegiatan penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang berjudul **“ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA SUMSEL”**.

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Tidak lupa pada kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy Mikial, SE.,M.Si.,Ak.CA,CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang dan juga selaku Pembimbing I saya.

4. Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE.,MM.,M.,Ak.,Ak.CA. Selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan penyelesaian skripsi dan memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
6. Direktur Binmas Polda Sumsel dan seluruh staff Ditbinmas Polda Sumsel.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua ku, Bapak Damanhuri dan Ibu Nurni serta kedua saudara yang telah memberiku dukungan, semangat, motivasi dan tak pernah berhenti mendoakan ku.
8. Teman-teman seperjuanganku, terima kasih untuk kebersamaan selama menjadi mahasiswa di Universitas Tridinanti Palembang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan penulis sendiri khususnya serta dapat menjadi sumbangan ilmu bagi almamater serta amal kebaikan bagi penulis.

Palembang September 2020



Rahmanida Rizky Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.1.1 Perencanaan.....	11
2.1.2 Pelaksanaan.....	12
2.1.3 Akuntansi Pemerintah.....	13
2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	13
2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah.....	13
2.1.4 Anggaran.....	14
2.1.4.1 Pengertian Anggaran.....	14
2.1.4.2 Fungsi Anggaran.....	15
2.1.4.3 Anggaran Belanja Negara.....	16

2.1.4.4 Klasifikasi Anggaran.....	17
2.1.4.5 Siklus Anggaran.....	19
2.1.4.6 LRA Anggaran.....	25
2.1.4.7 Analisis Varians.....	25
2.1.5 DIPA.....	26
2.1.5.1 Pengertian DIPA.....	26
2.1.5.2 Penyusunan DIPA.....	27
2.1.5.3 Penerbitan POK.....	30
2.1.5.4 Pencairan DIPA.....	30
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.1 Sumber Pengumpulan Data.....	43
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling.....	45
3.3.1 Populasi.....	45
3.3.2 Sampel.....	45
3.3.2 Sampling.....	45
3.4 Rancangan Penelitian.....	46
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	46
3.6 Instrumen Penelitian.....	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Profil Ditbinmas Polda Sumsel.....	49
4.1.2 Visi dan Misi Ditbinmas Polda Sumsel.....	49
4.1.3 Tugas dan Fungsi Ditbinmas Polda Sumsel.....	50

4.1.4 Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Sumsel.....	52
4.1.5 Pejabat Pengelola APBN Ditbinmas Polda Sumsel.....	58
4.1.6 Perencanaan Anggaran pada Ditbinmas Polda Sumsel.....	64
4.1.6.1 Prosedur Perencanaan.....	64
2.1.6.2 Penyusunan RKA-K/L.....	66
4.1.6.3 Penyusunan DIPA.....	69
4.1.6.4 Pengesahan DIPA.....	70
4.1.6.5 Penyusunan POK.....	72
4.1.7 Pelaksanaan Anggaran pada Ditbinmas Polda Sumsel.....	74
4.1.7.1 Pelaksanaan DIPA.....	74
4.1.7.2 Revisi anggaran dalam DIPA/POK.....	76
4.1.7.3 Pencairan DIPA.....	77
4.1.7.4 Perwab (Realisasi) Gar Pada Lap Keu Tahunan.....	82
4.2 Pembahasan.....	67
4.2.1 Analisis Proses Perencanaan dan Pelaksanaan DIPA Ditbinmas Polda Sumsel.....	84
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88

DAFTAR TABEL

1.1 LRA Berdasarkan Jenis Belanja T.A 2018 dan T.A 2019.....	7
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	37
3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	47
4.1 Usulan Anggaran dalam Konsep RKA-K/L.....	67
4.2 Usulan Anggaran dalam Konsep RKA-K/L.....	68
4.3 Usulan Anggaran dalam Konsep RKA-K/L.....	68
4.4 DIPA T.A 2019.....	71
4.5 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DIPA T.A2019.....	74
4.6 Perubahan Anggaran DIPA T.A 2019.....	76
4.7 Perubahan Anggaran Belanja Barang pada DIPA T.A 2019.....	77
4.8 LRA Berdasarkan Jenis Belanja T.A 2019.....	83
4.9 Perbandingan Realisasi Anggaran T.A 2019 dan T.A 2018.....	83

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	42
4.1 Bagan Struktur Organisasi.....	58

ABSTRAK

RAHMANIDA RIZKY PRATIWI, Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel (Dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana,SE.,M.S,Ak.CA dan Bapak Rifani Akbar Sulbahri,SE,MM,M.Ak,Ak.CA)

Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat yang berada dibawah unit organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat. Guna menjalankan tugasnya, Ditbinmas Polda Sumsel sebagai pelaksana APBN menyusun rencana kegiatan untuk satu tahun yang disebut anggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran disusun dokumen yang disebut DIPA. Secara garis besar, skripsi ini membahas tentang proses perencanaan dan pelaksanaan yang tertuang dalam DIPA satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam DIPA pada satuan kerja Ditbinmas Polda Sumsel. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dokumen DIPA, revisi DIPA, daftar surat perintah pencairan dana (SP2D) dan Laporan Keuangan Tahunan Ditbinmas Polda Sumsel pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan DIPA pada satker Ditbinmas Polda Sumsel sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaan DIPA sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran hampir terserap semuanya yaitu 99.55% namun dalam perencanaan kegiatan rutin sering kali terlambat dalam hal penyampaian rencana kebutuhan anggaran sehingga hampir semua belanja barang dibayar menggunakan mekanisme pembayaran UP.

Adapun berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam DIPA Ditbinmas Polda Sumsel untuk tahun anggaran berikutnya agar dapat lebih optimal sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Perencanaan DIPA dan Pelaksanaan DIPA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RAHMANIDA RIZKY PRATIWI dilahirkan di Palembang pada tanggal 3 Mei 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Damanhuri dan Ibu Nurni..

Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 188 Palembang pada tahun 2005 sampai dengan 2011. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palembang, selanjutnya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang tahun 2014 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2020

Penulis



Rahmanida Rizky Partwi

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmanida Rizky Pratiwi
Nomor Pokok : 1601120055
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA SUMSEL”**. Adalah benar-benar merupakan karya asli saya. Kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, September 2020

Penulis,



Rahmanida Rizky Partiwi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk tujuan bernegara maka disusunlah suatu dokumen anggaran pemerintah setiap tahun yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisikan perkiraan jumlah penerimaan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran.

APBN sebagai penjabaran rencana kerja dan anggaran masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah Negara. APBN mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, untuk itu APBN harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan oleh setiap penyelenggaran negara atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini disebutkan pada Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan pemisahan wewenang antara

pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Pemegang kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pemegang kewenangan perbendaharaan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Pemisahan ini dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terlaksananya saling uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip yang sangat penting dari pengendalian intern yaitu pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbandaharaan dalam pelaksanaan ABPN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, setelah APBN ditetapkan maka Menteri Keuangan akan memberitahukan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah. Di dalam DIPA, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah dibahas dan dianggap sesuai dengan APBN serta secara administrasi sudah benar maka DIPA tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian bisa digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan kegiatan.

Adapun pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dijelaskan bahwa DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang berlaku untuk satu tahun anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penyerapan DIPA tidak akan maksimal jika perencanaan yang dibuat tidak optimal, sebaliknya perencanaan yang optimal akan mempermudah proses penyerapan DIPA. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang perencanaan yaitu (Hendris Heriyanto : 2012), Perencanaan yang tidak matang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal, (Kadek Mia : 2017) Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dan (Jauhari : 2017), Penyerapan anggaran akan mengalami kelambatan bila perencanaan kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran.

Untuk itu, agar penggunaan anggaran bisa tepat waktu dan dapat dilakukan dengan maksimal tentu diperlukan banyak bantuan peran dan tanggungjawab dari berbagai pihak dalam suatu organisasi pemerintahan. Baik, dalam hal pemberi keputusan dan dalam hal penandatanganan disetujuinya anggaran untuk dapat digunakan serta dibutuhkan sasaran dan strategi untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga setiap anggaran dapat digunakan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan Brown (2005), Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai

keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis.

Disamping perencanaan, pelaksanaan anggaran juga berperan penting terhadap penyerapan anggaran agar maksimal. Menurut Suryopratomo (2010) kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Polda, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel yang selanjutnya disebut Ditbinmas merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat yang berada dibawah unit organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditbinmas Polda Sumsel bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

Guna menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan pembinaan masyarakat, Ditbinmas Polda Sumsel sebagai pelaksanaan APBN menyusun

rencana kegiatan untuk satu tahun berdasarkan perkiraan kebutuhan dananya yang disebut anggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran, disusun dokumen yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran (PA) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kapolri selaku Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kapolri selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA yaitu Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Dalam hal ini adalah Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel sebagai Kasatker di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Dalam DIPA satker Ditbinmas Polda Sumsel disebutkan beberapa besaran anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain dalam satu tahun

anggaran untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu Pembinaan Masyarakat pada tingkat Polda. Besaran anggaran-anggaran belanja ini tentu akan mempengaruhi kualitas Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan Ditbinmas Polda Sumsel. Untuk itu diperlukan analisis-analisis yang memadai mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Ditbinmas Polda Sumsel.

Pada tahun 2018, dana DIPA yang dikelola oleh satuan kerja Ditbinmas Polda Sumsel adalah sebesar Rp.8.182.832.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.160.791.629,- atau mencapai 99.73%. Sedangkan pada tahun 2019, dana DIPA yang dikelola sebesar Rp.7.113.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.315.696.500,- atau mencapai 116.91%.

Ringkasan data mengenai anggaran dan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019, jika diuraikan dalam jenis belanja dapat dilihat sebagai berikut pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
T. A 2018 dan T.A 2019

Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi		% Realisasi Anggaran	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Belanja Pegawai	6.356.427.000,-	5.189.809.000,-	6.350.226.983,-	6.403.608.328,-	99.90%	123.38%
Belanja Barang	1.826.405.000,-	1.923.266.000,-	1.810.564.646,-	1.912.088.172,-	99.13%	99.41%
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-	0,-	0%	0%
Jumlah	8.182.832.000,-	7.113.075.000,-	8.160.791.629,-	8.315.696.500,-	99.7%	116.91%

Sumber : Laporan Keuangan Ditbinmas Polda Sumsel T.A 2018 dan T.A 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran rata-rata hampir mencapai 100% penyerapan anggaran, meskipun ada yang melebihi 100% yaitu Belanja Pegawai pada Tahun 2019, dikarenakan beberapa faktor antara lain kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai, adapun realisasi Belanja Modal pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah masing-masing 0% dikarenakan Ditbinmas Polda Sumsel memang tidak memiliki dukungan anggaran Belanja Modal pada tahun tersebut.

Meskipun mekanisme pencairan DIPA di lingkup satker Ditbinmas Polda Sumsel selama ini telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dilihat dari segi penyerapan anggarannya juga sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan terlambatnya proses pencairan DIPA tersebut.

Mengingat pentingnya pelaksanaan DIPA yang efektif dan efisien untuk mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam satu tahun anggaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA SUMSEL”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi yang bermanfaat kepada pimpinan atau pengambilan keputusan

di masa yang akan datang, terutama informasi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan DIPA yang efektif dan efisien.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur atau bahan bacaan yang ada di perpustakaan serta bahan referensi bagi para pembaca mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk dijadikan sebagai acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis dalam penyusunan anggaran serta dapat menganalisis permasalahan yang ada dan meningkatkan pengetahuan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan DIPA.

2. Manfaat akademik

a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya ilmu akuntansi, khususnya Akuntansi Pemerintah.

b. Sebagai masukan empiris untuk mengembangkan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintah yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah yang tertuang dalam DIPA masing-masing satker.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, 2005, "***Perencanaan Strategis***"
(<http://search.proquest.com/docview/232327293/DC2B2FD23CA4E37PQ/I?accountid=45762>) 23 Maret 2014.
- Erly Suandy, 2003, ***Perencanaan Pajak***, Edisi Revisi. Selemba Empat: Jakarta.
- Fakultas Ekonomi, 2014, ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir***, Cetakan Kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti: Palembang.
- Fitriananda, 2017, ***Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang***, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.
- Founda Fahrial, 2016, ***Analisa Perencanaan dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumatera Selatan***, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.
- Guntur Setiawan, 2004, ***Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan***, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Hendris Heriyanto, 2012, ***Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran Jakarta***, Tesis, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia : Jakarta.
- Hendrizar, 2016, ***Sistem Dan Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Pada Bagian Keuangan Univeritas Andalas***, Tesis, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas: Padang.
- [Http://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_the_Functions_of_Government](http://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_the_Functions_of_Government).
- Indra Bastian, 2006, ***Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar***, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Ismail Solihin, 2009, ***Pengantar Manajemen***, Erlangga: Jakarta.

Iwan Purwanto, 2006, *Manajemen Strategi*, Edisi Kesatu, Yrama Widiya: Bandung.

Jauhari, 2017, *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I Dan KPPN Bandung II*, Tesis, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan : Bandung.

Kadek Mia Ranisa Putri, dkk, *“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)”*, Jurnal. Akuntansi, 2017. hal.1.

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Keuangan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel Tahun 2018.

Laporan Keuangan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel Tahun 2019.

M. Agus Hikmawansyah, 2013, *Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Untuk Menghasilkan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yang Berkualitas Pada Balai Diklat Keuangan Palembang*, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.

M. Munandar, 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE Universitas Gadjad Mada: Yogyakarta.

M. Narafin, 2012, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta.

Modul Keuangan Negara Tahun 2008 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja.

Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta.

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002, *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

R. Terry George, 1978, *Principle of Management*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illionis, Se-venth Edition.

Radiansyah, 2012, *Analisis Pengelolaan Keuangan Negara melalui Mekanisme Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Balai Diklat Keuangan Palembang*, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Rizqa Annisa Fithri, 2017, *Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Kanreg VI BKN Medan*, Tugas Akhir, Program Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Sumatera Utara: Medan.

Sofyan Syafitri Harahap, 2001, *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surat Pengesahan DIPA Ditbinmas Polda Sumsel Tahun 2019.

Surat Perintah Pencairan Dana Ditbinmas Polda Sumsel Tahun 2019.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syahru Rinando, 2012, *Analisis Prosedur dan Pencairan Anggaran pada Balai Diklat Keuangan Palembang*, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Titi Susanti, 2016, *Analisis Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Di Kabupaten Pasaman Barat*, Tesis, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas: Padang.

TOR dan RAB Ditbinmas Polda Sumsel Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Yuvira Margaretha, 2018, *Analisis Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional Pada Sekretariat Dearah Musi Banyuasin*, Skripsi, Program Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti: Palembang.